

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

ARIEF RAKHMAN HAKIM

21513A0005

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021**

Oleh :

ARIEF RAKHMAN HAKIM

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Pada tanggal 14 Oktober 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN. 0804116101



Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0825078701

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021

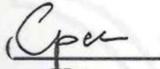
Oleh :

ARIEF RAKHMAN HAKIM
NIM. 21513A0005

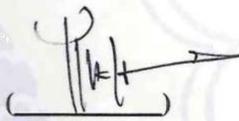
Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 14 Oktober 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si**
NIND. 0825038303


Ketua

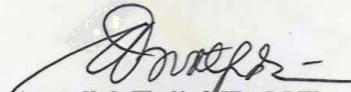
2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**
NIND. 0827118801


Anggota

3. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**
NIND. 0816057902


Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : ARIEF RAKHMAN HAKIM

Nim : 21513A0005

Memang benar skripsi yang berjudul : “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021” ini benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi di tempat manapun.

Skripsi ini murni hasil gagasan, rumusan dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang acuan sebagai sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terdapat tidak benar, maka saya siap mempertanggung jawabkan termasuk bersedia meninggalkan gelar serjana yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram 17 Maret 2021

Mahasiswa



ARIEF RAKHMAN HAKIM
NIM. 21513A0005



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIEF PAKHMAN HAKIM
NIM : 21513A0005
Tempat/Tgl Lahir : TALUNANG 10 Januari 1999
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FIKIPOL
No. Hp : 082 359 043 681
Email : Triabaris1999@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENBELAJARAN GAMPAN
DI KABUPATEN SUMBANGA BARAT TAHUN 2021

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 29 SEPTEMBER 2021

Penulis



ALIEF PAKHMAN HAKIM
NIM. 21513A0005

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskanant, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEF RAHMANN HAKIM
 NIM : 21513A0005
 Tempat/Tgl Lahir : TALINAH 10 Januari 1999
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 082 359 093 681 / Triatariis.1999@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 September 2021
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ARIEF RAHMANN HAKIM
 NIM. 21513A0005



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“BAHAGIAKU SEDERHANA KARENA KEBAHAGIAAN YANG HAKIKI
ADALAH KETIKA KITA BISA BERMANFAAT UNTUK ORANG LAIN:

(ARIEF RAKHMAN HAKIM)

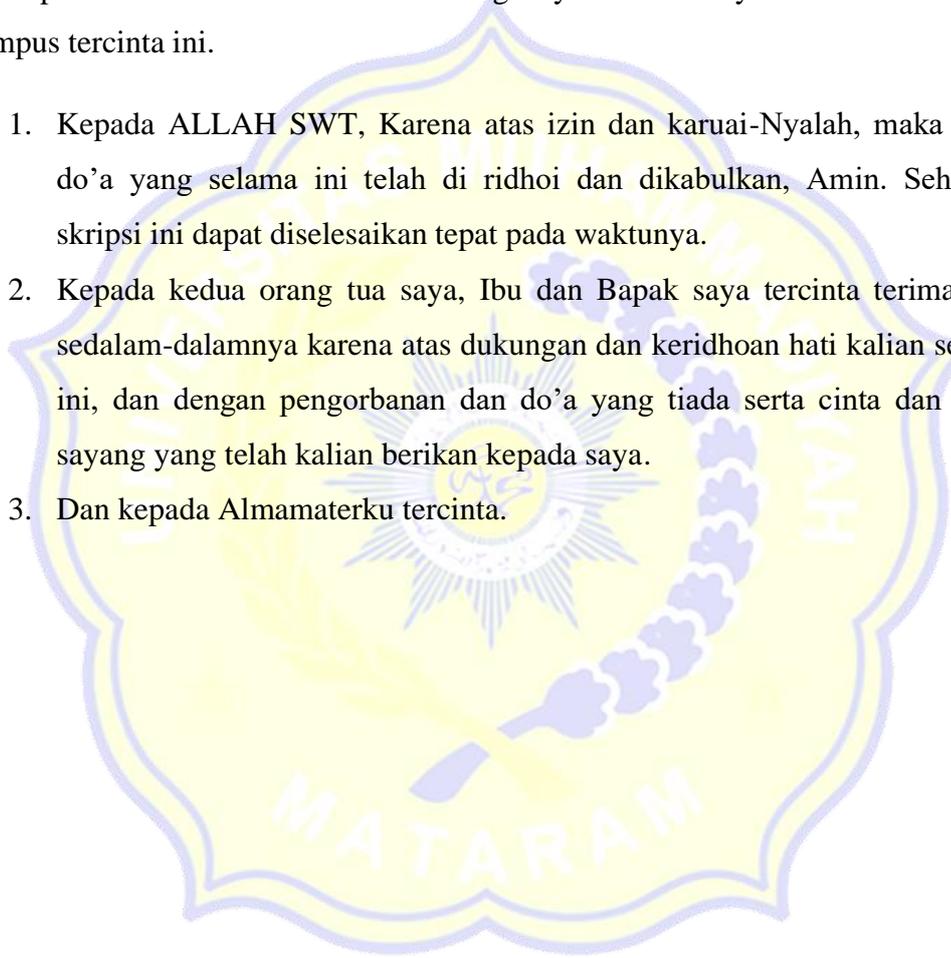


PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi ALLAH SWT, dan atas do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang tercinta yang tidak putus-putus mendoakan dan mendukung saya selama saya menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

1. Kepada ALLAH SWT, Karena atas izin dan karuahi-Nyalah, maka do'a-do'a yang selama ini telah di ridhoi dan dikabulkan, Amin. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kepada kedua orang tua saya, Ibu dan Bapak saya tercinta terimakasih sedalam-dalamnya karena atas dukungan dan keridhoan hati kalian selama ini, dan dengan pengorbanan dan do'a yang tiada serta cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepada saya.
3. Dan kepada Almamaterku tercinta.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada ALLAH *Subhanahu Wata'ala* yang telah banyak memberikan nikmat, taufik serta hidayah. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya berjudul “**Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021**” dengan baik tanpa ada halangan yang berarti.

Dengan karya ini saya berharap dapat membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa indonesia melalui pembangunan desa di Desa Mapin Rea. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP,. M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP,.M.IP selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan berbagai macam arahan dan keritikan sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Orang tua peneliti yang telah memberikan do'a, motivasi, serta dukungan semangat bagi peneliti agar menyelesaikan proposal ini dengan baik.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan semua pihak yang telah memberikan masukan, dorongan, serta semangat motivasi kepada peneliti.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan do'a dan dukungan hingga dapat terselesainya skripsi ini.

Diluar dari itu, penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa masi banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi tata bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, saya selaku penyusun menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Mataram 17 Maret 2021
Penulis

Arief Rakhman Hakim

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021

Arief Rakhman Hakim¹, Lalu Sopan Tirta Kusuma², Yudhi Lestanata³
Mahasiswa, Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Tata kelola infrastruktur lingkungan adalah masalah yang dihadapi setiap kota, bahkan kota yang sedang berkembang. Air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah adalah semua masalah yang dihadapi tata kelola infrastruktur lingkungan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini, Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Pengelolaan Sampah, Bagaimana Identifikasi Masalah terhadap faktor – faktor pendukung maupun penghambat kebijakan Pemerintah tersebut. Tujuan Penelitian, Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah dalam melakukan Pengelolaan Sampah berdasarkan Undang Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat. Mengidentifikasi faktor - faktor pendukung maupun penghambat kebijakan Pemerintah berdasarkan Undang Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang menitikberatkan pada proses dan makna masalah yang diangkat dalam penelitian.

Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Pengelolaan Sampah perlu melibatkan stekholder terkait, karena dalam menyadarkan masyarakat terkait penanganan sampah membutuhkan metode yang pas, sehingga mampu di tangani dengan serius. Teknologi ini digunakan untuk mengurangi kuantitas dan kompleksitas sampah secara regional. Rantai transportasi yang panjang dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang signifikan akan terpotong dengan model ini (APBD). Selanjutnya, masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam pengelolaan, sehingga menghasilkan proses dan hasil yang secara signifikan lebih unggul dari cara saat ini. Masyarakat selalu berpartisipasi dalam proses pembangunan jika ada variabel pendukung, seperti kebutuhan, harapan, motivasi, penghargaan, kebutuhan sarana dan prasarana, dorongan moral, dan keberadaan lembaga informal dan formal. Salah satu komponen teknologi dalam mengatasi permasalahan sampah perkotaan atau lingkungan pemukiman yang semakin sulit dari tahun ke tahun adalah pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycling (mendaur ulang) adalah tiga metode yang cukup mudah diterapkan dan dapat menguntungkan secara ekonomi.

KATA KUNCI : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah

Arief Rakhman Hakim¹, Lalu Sopan Tirta Kusuma², Yudhi Lestanata³
Student, Principal Advisor, Companion Advisor
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

Environmental infrastructure governance is a challenge that affects all cities, including those in developing countries. Environmental infrastructure governance is confronted with concerns such as clean water, sanitation, and waste management. The formulation of the problem include, how government policy affects waste management, and how to identify difficulties with government policy's supporting and inhibiting aspects. The research goals are to: a) determine the government's waste management policy based on Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management and Minister of Public Works Regulation No. 21/PRT/M/2006 concerning National Policies and Strategies for Solid Waste Management Systems and Waste Management Conditions in West Sumbawa Regency, and b) identify supporting factors and obstacles to government policies based on Law no. 18 of 2008 concerning Waste Management, and Regulation of the Minister of Public Works No. 21/PRT/M/2006 concerning National Policies and Strategies for Solid Waste Management Systems and Waste Management Conditions in West Sumbawa Regency. The research method employed was descriptive qualitative research, which focuses on the process and significance of the issues raised in the study.

Government policies on trash management must include important stakeholders, because raising public awareness about waste management requires the appropriate approach, so that it can be managed responsibly. This technology is used to reduce the volume and complexity of garbage in a given region. With this concept, the long transportation chain and a large portion of the Regional Revenue and Expenditure Budget will be eliminated (APBD). Furthermore, communities are participating in the management process together, resulting in processes and outcomes that are far superior to present ways. The community always participates in the development process if there are supporting variables, such as needs, expectations, motivation, appreciation, needs for facilities and infrastructure, moral encouragement, and the existence of informal and formal institutions. The involvement of the community in trash management is one of the technological components in overcoming the problem of urban garbage or residential environments, which is becoming increasingly challenging year after year. Reduce, Reuse, and Recycling are the most three simple and cost-effective strategies in overcoming the trash issues.

Keywords: *Policy, Local Government, Waste Management*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT BEBAS PLAGIALISME.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Manfaat Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Penelitian Relevan	
2.2 Landasan Teori	
2.2.1 Kebijakan	

2.2.2	Pemerintah Daerah	
2.2.3	Bentuk Pemerintahan Daerah	
2.2.4	Fungsi Pemerintahan Daerah	
2.2.5	Tugas Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah.....	
2.2.6	Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah.....	
2.2.7	Pengelolaan Sampah	
2.3	Kerangka Berfikir	
2.3.1	Definisi Konseptual.....	
2.3.1	Definisi Operasional	
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Metode Penelitian	
3.2	Lokasi Penelitian.....	
3.3	Sumber Data.....	
3.3.1	Data Primer	
3.3.2	Data Skunder.....	
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	
3.4.1	Metode Observasi	
3.4.2	Metode Wawancara.....	
3.5	Teknik Analisis Data.....	
3.5.1	Reduksi Data	
3.5.2	Penyajian Data	
3.5.3	Penarikan Kesimpulan	

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran umum.....

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Kondisi Pengelolaan Sampah.....

4.2.2 Dampak Pencemaran Akibat Sampah.....

4.2.3 Rencana Pembangunan Sistem Pengelolaan Sampah.....

4.2.3.1 Teknis-Teknologi

4.2.4 Perencanaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat.....

4.2.5 Pengaturan.....

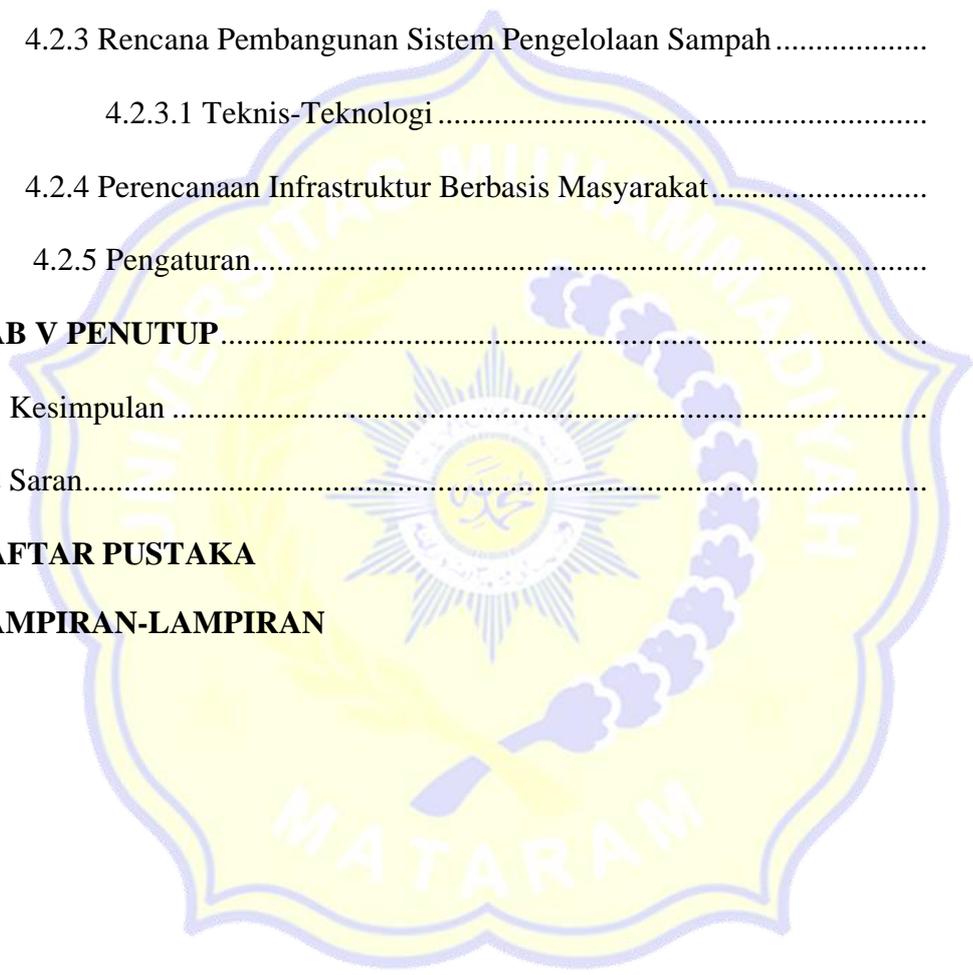
BAB V PENUTUP.....

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Sumbawa barat.....
2. Tabel 2. Persentase Pelayanan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.....
3. Tabel 3. Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
4. Tabel 4. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Tata kelola infrastruktur lingkungan adalah masalah yang dihadapi setiap kota, bahkan kota yang sedang berkembang. Air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah adalah semua masalah yang dihadapi tata kelola infrastruktur lingkungan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin bertambah pula jumlah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Akibatnya, jumlah sampah yang terakumulasi akibat aktivitas manusia semakin bertambah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah lingkungan dengan tujuan utama meminimalkan sampah dan memanfaatkan sampah agar tidak menjadi sia-sia dan dibuang begitu saja. (Tri Karisma Jati, 3 : 2014)

Sampah adalah kegiatan sisa-sisa kehidupan sehari-hari atau proses alam yang berupa zat organik padat dan anorganik yang bersifat biodegradable dan nonbiodegradable yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah akan bermanfaat bagi lingkungan jika dikelola dengan baik, namun sampah dapat berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan serta dapat menimbulkan bencana jika tidak dikelola dengan baik. (Sumber : Fiter Akbar, 2 : 2018)

Yang dimaksud dengan sampah kota adalah sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota. Persoalan sampah kota adalah volumenya melebihi kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Sumber: Mulasari dkk, 22 : 2016)

Sampah adalah masalah utama yang kita hadapi sekarang. Seperti yang terjadi saat ini di pusat kota, khususnya di area publik seperti pasar, terminal, jalan raya, dan berbagai lokasi lainnya. Masalah sampah di perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pola konsumsi, pola perilaku penduduk, aktivitas fungsi kota, kepadatan penduduk dan bangunan, serta kompleksitas masalah dan transportasi merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. (Sumber: Sugiyantoro, 31: 2015)

Karena kuantitas sampah semakin meningkat, komposisi semakin beragam, terbatasnya sumber keuangan untuk pelayanan publik, pengaruh pembangunan ekonomi, dan semakin tinggi potensi kegiatan persampahan, masalah sampah menjadi semakin kompleks dalam kaitannya dengan sampah. pengelolaan. Keberadaan limbah ini dapat meresahkan karena dapat menimbulkan penyakit seperti tifus, diare, demam berdarah, dan penyakit lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Kesmas, 12 : 2014)

Pengelolaan sampah saat ini sedang mengalami banyak tekanan, karena semakin banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Hal ini diperparah dengan paradigma manajemen lama yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, yang kesemuanya itu memerlukan anggaran yang semakin besar dari waktu ke

waktu, yang jika tidak tersedia akan menimbulkan berbagai persoalan operasional, termasuk sampah yang tidak terkumpul, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, dan cara pengoperasian fasilitas yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada akhirnya permasalahan tersebut akan mengakibatkan kurangnya kuantitas dan kualitas pelayanan, serta pengabaian terhadap perlindungan lingkungan dalam pengelolaannya, yang jika tidak segera diatasi akan berdampak negatif terhadap kepercayaan dan kerjasama masyarakat, yang keduanya merupakan penting dalam mendukung pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. (sumber : Yasa MT, 15 : 2014)

Permasalahan Penyelenggaraan pengelolaan sampah juga terjadi di Kota Sumbawa Barat. Laju perkembangan kawasan di Kota Sumbawa Barat ini telah melampaui batas admintrasi kota, terlihat dari penigkatan jumlah penduduk yang bermukim tiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 130.577 jiwa dan tahun terakhir 2019 ini sebanyak 134.239 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini akan memicu meningkatnya kegiatan industri, jasa dan bisnis serta masih banyak lagi sehingga akan memicu meningkatnya limbah bungan atau sampah. Secara faktual sampah, peningkatan jumlah sampah di Kota Sumbawa Barat ini mengalami kenaikan yang cukup signifiikan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 72.389.200 ton/tahun dan pada tahun 2019 kemarin sebanyak 88.568.456 ton/tahun. (DKP Kota Sumbawa Barat).

Begitu banyak sekali permasalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat, hal ini membuat Pemerintah Kota Sumbawa Barat membuat kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Sumbawa

Barat Didasarkan Pada Undang Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat.

Upaya pemerintah tidak boleh berhenti di situ; mereka harus didukung oleh inisiatif nyata untuk menerapkan kebijakan. Karena, pada intinya, sebuah kebijakan adalah visi tentang apa yang harus dicapai oleh pemerintah. Lihatlah apa yang diusulkan dalam praktik pada masalah tertentu. Rencana yang telah disusun akan menjadi dokumen resmi di meja pembuat kebijakan jika kebijakan tidak dilaksanakan. Untuk menyelenggarakan implementasi kebijakan, pemerintah juga harus berfungsi secara efisien. Dikatakan efektif jika tindakan pemerintah telah menghasilkan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai permasalahan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Sumbawa Barat dan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan, (Undang Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat) maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Taliwang Tahun 2021

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah – masalah yang akan diteliti sehingga dapat menentukan pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah dalam hal ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana Identifikasi Masalah terhadap faktor – faktor pendukung maupun penghambat kebijakan Pemerintah tersebut?

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah khususnya prodi ilmu pemerintahan.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan sampah di wilayah kota khususnya di kota taliwang.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah dalam melakukan Pengelolaan Sampah berdasarkan Undang Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem

Pengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Mengidentifikasi faktor - faktor pendukung maupun penghambat kebijakan Pemerintah berdasarkan Undang Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional SistePengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan & Persamaan
1.	Fiter Akbar (2014)	Implementasi Peraturan daerah No 2 Tahun 2011 kota Bengkulu tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.	Metode deskriptif, kualitatif, teknik pengambilan sampel dan pengambilan data dengan observasi dan wawancara	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan masih rendah.	Persamaan dengan yang akan penulis susun pada bentuk pengelolaan sampah di satu wilayah kota. sedangkan perbedaannya peneliti langsung kepada kebijakan pemerintah, dan pada skripsi diatas adalah

					pada peraturan undang-undang daerah No 02 Tahun 2011
2.	Rizka Firdausa Fitri (2013)	Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan sampah Terpadu Randegan Kota Mojokerto	Metode serveri dan pengambilan data menggunakan obersevasi dan wawancara	Tingkat partisipasi dalam pengelolaan sampah terpadu masih memiliki tingkat partisipasi sedang.	Persamaan dengan yang penulis susun ialah sama – sama membahas tentang kebijakan pemerintah di suatu wilayah. Perbedaannya terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dan diperankan oleh sebagian

					anggota masyarakat
3.	Reni Masari (2015)	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata goa lawa di Kab. Purbolinggo.	Motode survei, sampel area sampling. Analisis deskriptif. Data : primer dan sekunder	Tingkat partisipasi dalam pengembangan obyek wisata goa lawa Kab purbolinggo memiliki tingkat partisipasi yang sedang.	Penelitian ini berfokus pada pengelolaan obyek wisata, namun pada penelitian penulis saat ini bagaimana menjaga kebersihan daerah wisata dari partisipasi masyarakat.
4.	4.Purnama (2013)	Pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap proyek perberdayaan kecamatan	Metode yang digunakan metode uji linier sederhana, dan uji linier berganda.	Tingkat partisipasi tinggi 55% dan sebaliknya 45% berpartisipasi renda di Kab	Di penelitian sebelumnya hanya partisipasi masyarakat, apakah berpengaruh

		terpadu di Kab.Simalungu n.		simalungang	terhadap pemberdayaan kecamatan Terpadu. Sedangkan pada penelitian saat ini bagaimana cara dalam menjaga kebersihan daerah wisata.
5.	5.Elfana Argadinata (2014)	Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kawasan lingdung di desa dieng, kecamatan kejajar Kab.Wonosobo.	Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan	Tingkat partisipasi masyarakat desa dieng meiliki tingkat sedang.	Dalam penelitian ini, hanya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi namun dalam penelitian saat ini meningkatkan

			observasi dan wawancara . analisis menggunakan kuantitatif dan kualitatif.		kualitas wisata dari pengaruh masyarakat dalam menjaga kebersihan daerah wisata, sedangkan untuk mengetahui sampai sejauh mana partisipasi masyarakatnya dalam pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan pemerintah.
--	--	--	---	--	---

Penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis saat ini memiliki beberapa perbedaan. Di penelitian sebelumnya banyak menggunakan teknik sampling atau populasi dan sampel. Dari penelitian penulis menggunakan tehnik informan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Persamaan dair penelitian sebelumnya sama-

sama menggunakan metode kualitatif dan juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai kecerdasan, kecakapan, kebijaksanaan, rangkaian konsep, dan prinsip yang menjadi dasar dan dasar perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip, atau niat sebagai pedoman dalam buku Administrasi Kontemporer oleh Syaiful Syagala. (Sumber : Syaiful Syagala, 20 : 2012).

Para ahli memiliki beragam sudut pandang tentang kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa pandangan ahli tentang kebijakan pemerintah:

1. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2011 : 7)

Kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang direkomendasikan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu dengan hambatan dan kemungkinan kebijakan yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sudut pandang ini juga menunjukkan bahwa konsep kebijakan yang menggabungkan aktivitas yang bertujuan merupakan aspek penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun juga, kebijakan harus menunjukkan apa yang sebenarnya

dilakukan daripada apa yang direkomendasikan dalam beberapa aktivitas pemecahan masalah.

2. Irfan Islamy sebagaimana dikutip di suandi (2010: 2)

Sangat penting untuk membedakan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan yang berbeda, yang menunjukkan kebijaksanaan, diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda, yang berarti kebijaksanaan.

Menurut Budi Winarjno (2007:18), pendekatan kebijakan Anderson lebih tepat karena menitikberatkan pada apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang disarankan atau dimaksudkan. Lebih jauh, gagasan ini membedakan antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision), yang memerlukan pemilihan di antara berbagai opsi.

3. Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5)

Jelaskan bahwa kebijakan publik mengandung setidaknya tiga dimensi yang saling berhubungan: tujuan (tujuan), pilihan tindakan yang sah atau sah secara hukum (pilihan otoritatif), dan hipotesis (hipotesis).

a. Kebijakan publik sebagai tujuan

Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik, sebagai konstituen pemerintah.

b. Kebijakan public sebagai pilihan tindakan yang legal

Karena dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan, maka pilihan tindakan kebijakan tersebut sah atau berwibawa. Keputusan tersebut mewajibkan

pegawai negeri untuk mengambil atau mengarahkan tindakan atau kegiatan tertentu, seperti merancang undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau menyediakan dana untuk melaksanakan inisiatif tertentu.

4. Siti Kurnia Rahayu (2010)

Mengutip definisi Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan tentang kebijakan negara sebagai "program tujuan, keyakinan, dan kegiatan terarah yang diproyeksikan," (Lauddin Marsuni, 2006).

Lebih lanjut, Rahayu (2010) merangkum kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur fundamental sebagai berikut:

- Tujuan
- Proposal (plans)
- Program
- Keputusan
- Efek

a. Tujuan

Rumitnya tujuan yang ingin dicapai termasuk dalam tujuan. Semakin sulit untuk mencapai kinerja kebijakan, semakin rumit tujuan kebijakan. Di sisi lain, semakin lugas tujuan kebijakan, semakin mudah untuk dicapai.

b. Proposal (plans)

Proposal yaitu rancangan bisnis atau rancangan usaha yang ingin dilakukan.

c. Program

Program yaitu serangkaian instruksi yang di tulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada sebuah kebijakan. Program juga memiliki model pengekseskuan tertentu agar dapat secara langsung di eksekusi.

d. Keputusan

Keputusan adalah hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengarah pada pemilihan rencana tindakan dari antara berbagai pilihan. Membuat keputusan selalu mengarah pada satu keputusan akhir.

e. Efek

- Positif
Kebijakan yang di hasilkan pemerintah.
- Negatif atau buruk
Kebijakan yang tidak di inginkan oleh masyarakat karena menimbulkan rasa tidak aman.

Berdasarkan pendapat dan penjelasan kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang disengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya untuk memilih di antara berbagai alternatif yang berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.2 Pemerintah daerah.

Suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya dikenal sebagai pemerintahan lokal. Penguasa suatu

negara atau penguasa negara tertinggi yang mengatur suatu negara merupakan contoh pemerintahan.

Dalam arti luas, pemerintah adalah semua aparatur negara, yang terdiri dari organ, badan, atau lembaga, serta aparatur pemerintah yang menjalankan berbagai tugas untuk mencapai tujuan negara.

Pengertian pemerintahan dalam cangkupan umum ialah segala aktivitas yang terorganisir yang bersumber pada keadaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang mengawasi dan mengurus sendiri pemerintahannya disebut pemerintah daerah dalam arti luas.

2.2.3 Bentuk pemerintah daerah.

Pemerintahan sendiri lokal dan pemerintahan negara bagian adalah dua jenis pemerintahan lokal yang paling umum di dunia.

a. Local self government.

Sistem pemerintahan negara mengharuskan pemerintah daerah dalam bentuk pemerintahan daerah sendiri untuk menyelenggarakan

berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi daerah, yang berarti bahwa dalam beberapa kasus, penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika didelegasikan kepada pemerintah daerah tertentu.

Bentuk pemerintah daerah *Local self government* merupakan kosekuensi dari anutan Asas desentralisasidan penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. *Local state government*.

Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, organisasi pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonstrasi. Pemerintah wilayah atau pemerintah administasi di bentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintaha tertentu yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

2.2.4 Fungsi Pemerintah Daerah

Adapun fungsi pokok dari pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah yaitu;

a. Pengatur kebijakan (*Regulator*)

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dan rencana pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dalam melakukan pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah juga didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemerintah pusat. Selanjutnya, tugas pemerintah sebagai regulator kebijakan dapat dipenuhi dengan mendukung dan mengawasi kinerja

pengelolaan sampah oleh perusahaan ketiga. Persyaratan higiene umum, peraturan daerah tentang bentuk organisasi resmi pengelola sanitasi, peraturan daerah yang secara khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan merupakan semua peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah.

b. Penyediaan layanan (*service Provider*)

Pengelolaan sampah terikat dengan pemerintah sebagai penyedia jasa dalam pengelolaan sampah. Pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mempermudah, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Dalam praktiknya, pemerintah juga membuat layanan dan infrastruktur pengelolaan sampah lebih mudah diakses. Pemerintah juga terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan sampah. Selanjutnya, pemerintah mendorong penyebaran teknologi spesifik lokal yang dikembangkan masyarakat.

2.2.5 Tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah

Sebagai legislator, pembuat kebijakan, dan administrator, pemerintah memiliki berbagai peran dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari perspektif fungsional, menurut Suharto (2008: 49). Sebagai politisi, pemerintah merupakan pusat kegiatan politik dimana para politisi berkumpul untuk membahas topik-topik penting dalam dunia politik. Karena pemerintah bisa saja jatuh karena kebijakan yang dibuat dan diberlakukan, maka pemerintah memiliki tugas yang sangat signifikan

sebagai pembuat kebijakan. Sementara pemerintah peduli dengan tanggung jawab administratif seperti pemungutan pajak, pemberian layanan, dan penerapan aturan pendukung, pemerintah sebagai administrator tidak.

2.2.6 Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Setiap kabupaten dan kota memiliki lembaga pelaksana pengelolaan sampah masing-masing. DPU yang memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah ini pertama kali menangani masalah sampah di daerah. Badan khusus untuk pengelolaan sampah perkotaan dapat dibentuk sesuai dengan organisasi pemerintah dan hubungan antara sampah dan lingkungan, dan dapat dilakukan oleh setiap unit atau instansi selama ada pembagian kerja, program, dan standar yang jelas. prosedur operasi (SOP).

2.2.7 Pengelolaan Sampah.

a. Pengertian Pengelolaan Sampah.

Pengertian dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Sampah didefinisikan sebagai bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak bernilai untuk tujuan biasa atau utama dalam pembuatan atau penggunaan barang yang rusak atau cacat dalam pembuatan, atau bahan yang berlebihan, ditolak, atau dibuang, menurut Kamus Istilah Lingkungan dalam buku Iskandar Daur Ulang Sampah (2006: 1).

Sampah adalah sampah padat, setengah padat, atau cair yang dihasilkan sebagai akibat dari aktivitas perkotaan atau daur hidup

alami manusia, hewan, dan tumbuhan. Permukiman, pasar, pertokoan dan perdagangan, perkantoran dan fasilitas umum, kawasan industri, peternakan, dan fasilitas umum lainnya merupakan sumber sampah perkotaan (Kodoatie, 2005:216) Sampah juga didefinisikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber yang berasal dari kegiatan manusia dan proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (lihat Iskandar, 2006: 1). Selain itu, baik UU No.18 Tahun 2008 maupun Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2016 mengartikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Pengelolaan sampah kota adalah masalah yang tersebar luas, dan pemerintah daerah masih bertanggung jawab atas layanan tersebut. Kegiatan pengelolaan sampah kota secara teknis dibagi menjadi tiga tahap: pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan/pemusnahan. Pengumpulan sampah menurut Kodoatie (2005:218) merupakan langkah awal dalam rangkaian/proses pengelolaan/pembersihan sampah, selain operasi penyimpanan yang merupakan tugas dari penghasil/sumber sampah.

Sumber Timbunan Sampah yang timbul setiap hari berasal dari berbagai tempat. Sumber timbunan sampah antara lain :

1. Sampah rumah tangga (sampah rumah tangga) terdiri dari bahan padat yang telah digunakan dan dibuang sebagai akibat dari kegiatan rumah tangga, seperti sisa makanan (matang atau

mentah), kemasan bekas (kertas, plastik, daun dari pekarangan), pakaian bekas. , bahan bacaan, perabot rumah tangga, dan sebagainya.

2. Sampah di tempat umum adalah masalah serius. Pasar, tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan tempat umum lainnya menghasilkan sampah ini. Kertas plastik, botol, daun, dan bahan lainnya menjadi sampah ini.
3. Sampah dari tempat kerja Sampah ini berasal dari perkantoran, baik yang berasal dari bidang pendidikan, perdagangan, departemen, maupun bisnis. Kertas, plastik, karbon, klip, dan bahan lainnya membuat sampah ini. Sampah ini biasanya kering dan mudah terbakar.
4. Sampah dari jalan Sampah ini biasanya terdiri dari kertas, karton, debu, batu, pasir, ban yang sobek, komponen kendaraan yang jatuh, daun, plastik, dan bahan lainnya.
5. Limbah industri meliputi limbah yang timbul dari perkembangan industri serta limbah yang berasal dari proses manufaktur, seperti limbah kemasan, logam, plastik, kayu, sisa tekstil, kaleng, dan sebagainya.
6. Sampah pertanian/perkebunan meliputi jerami, sisa sayuran, batang padi, batang jagung, ranting kayu patah, dan sampah lain yang dihasilkan dari pertanian atau perkebunan.

7. Limbah pertambangan adalah jenis limbah yang berasal dari pertambangan dan bervariasi tergantung pada jenis operasi penambangan, seperti batuan, tanah/batuan, pasir, sisa pembakaran (arang), dan bahan lainnya.
8. Limbah peternakan dan perikanan Kotoran ternak, sisa makanan, bangkai hewan, dan limbah lainnya dari peternakan dan perikanan adalah contoh limbah ini.

b. Teknik Operasional

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, ruang lingkup pengaturan meliputi:

1. Sampah Rumah Tangga.

Sampah rumah tangga mirip dengan sampah rumah tangga karena timbul dari kegiatan sehari-hari di rumah, kecuali tinja dan sampah khusus. Kawasan pemukiman, kawasan bisnis, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya semuanya menghasilkan sampah seperti rumah tangga. Setelah memahami definisi sampah dan ruang lingkungannya, penting untuk mempertimbangkan pengelolaan sampah.

Menurut Perda Kabupaten Sumbawa Barat No.4 Tahun 2016 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan

dan penanganan sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah menurut peraturan daerah ini terdiri dari pengelolaan sampah rumah tangga beserta sampah sejenis sampah rumah tangga. Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah Tindakan pengurangan sampah meliputi pengurangan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan penggunaan kembali sampah. Operasi pengurangan sampah dalam peraturan daerah ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat, dan Pemerintah Daerah wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. Memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang;
5. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;

Pengurangan sampah Tindakan pengurangan sampah meliputi pengurangan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan penggunaan kembali sampah. Operasi pengurangan sampah dalam peraturan daerah ini

melibatkan pihak-pihak yang terlibat, dan Pemerintah Daerah wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah;
- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir;
- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya kemedialingkungan secara aman. Sedangkan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap puing bongkaran bangunan.

c. Aspek Instusi dan Menejemen

Mengacu pada kebijaksanaan dan strategi nasional pembangunan bidang persampahan serta ketentuan kelembagaan yang ada, yaitu Kepmendagri No. 80/1994, bahwa institusi pengelolaan persampahan untuk kota metropolitan dan kota besar pada prinsipnya diarahkan

menjadi perusahaan daerah kebersihan atau dinas kebersihan Pola maksimal atau dinas kebersihan pola minimal atau suku dinas kebersihan (Pola maksimal) atau suku dinas pekerjaan umum (Pola Minimal).

Aspek institusi dan manajemen meliputi;

- 1) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana persampahan dapat dilakukan secara sendiri atau terpadu oleh pemerintah daerah, BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat.
- 2) Bentuk institusi dan struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, secara umum bentuk institusi yang ada adalah perusahaan daerah kebersihan (PDK), Dinas kebersihan (DK), dinas kebersihan dan pertamanan (DKP), Seksi kebersihan dll.
- 3) Instansi pengelolaan persampahan sebaiknya memiliki pola kerja sama antara instansi terkait termasuk PLN (Untuk kerja sama penarikan retribusi) dan kerja sama antara kota untuk pola penanganan sampah secara regional dan kerja sama dengan masyarakat atau perguruan tinggi.
- 4) SDM sebaiknya memiliki keahlian bidang persampahan baik melalui pendidikan formal (ada staf yang memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan, ekonomi, ahli manajemen dll).
- 5) Kegiatan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

d. Aspek Pembiayaan.

Sumber pembiayaan pengelolaan sampah ialah sebagai berikut:

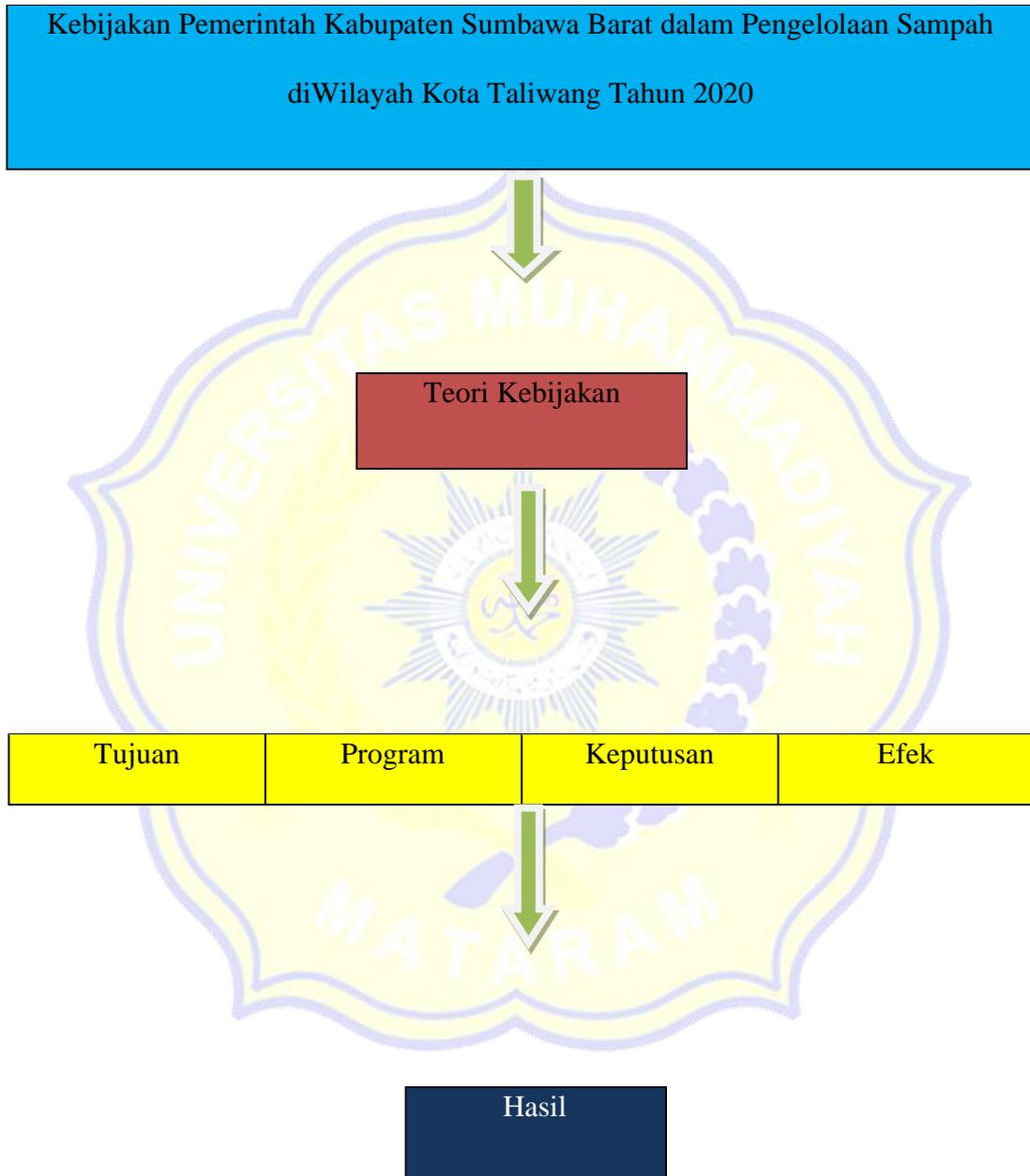
- 1) Pengelolaan persampahan dapat dibiayai dari swadaya masyarakat, investasi swasta, APBN/APBD
- 2) Tata cara pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku
- 3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan bangunan prasarana dan sarana persampahan dalam bentuk dana maupun aset kepada masyarakat.
- 4) Pembiayaan penyediaan dan pemeliharaan perwadhahan individual menjadi tanggung jawab penghasil sampah.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir, menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2013:60), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan banyak aspek yang telah diakui sebagai masalah utama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah didalamnya terdapat kerjasama aparatur negara dalam rangka berperan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di wilayah kota taliwang.

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3.1 Definisi Konseptual

a. Kebijakan

Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan landasan bagi pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

b. Pengertian pemerintah daerah.

Dalam arti luas, pemerintah adalah semua aparatur negara, yang terdiri dari organ, badan, atau lembaga, serta aparatur pemerintah yang menjalankan berbagai tugas untuk mencapai tujuan negara.

c. Tugas pemerintah daerah.

Karena pemerintah bisa saja jatuh karena kebijakan yang dibuat dan diberlakukan, maka pemerintah memiliki tugas yang sangat signifikan sebagai pembuat kebijakan.

d. Kebijakan pemerintah daerah.

UU No.18 Tahun 2008 maupun Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2016 mengartikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

e. Pengertian pengelolaan sampah

Sampah didefinisikan sebagai sampah padat, setengah padat, atau cair yang dihasilkan sebagai hasil kegiatan perkotaan atau daur hidup manusia, hewan, dan tumbuhan.

1. Sumber timbunan sampah
2. Sampah pemukiman

3. Sampah tempat umum
 4. Sampah perkantoran
 5. Sampah industri
 6. Sampah pertanian
 7. Sampah pertambangan
 8. Sampah perternakan dan perkebunan
- f. Proses pengelolaan sampah.

Pemilahan adalah proses pengelompokan dan pemilahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya.

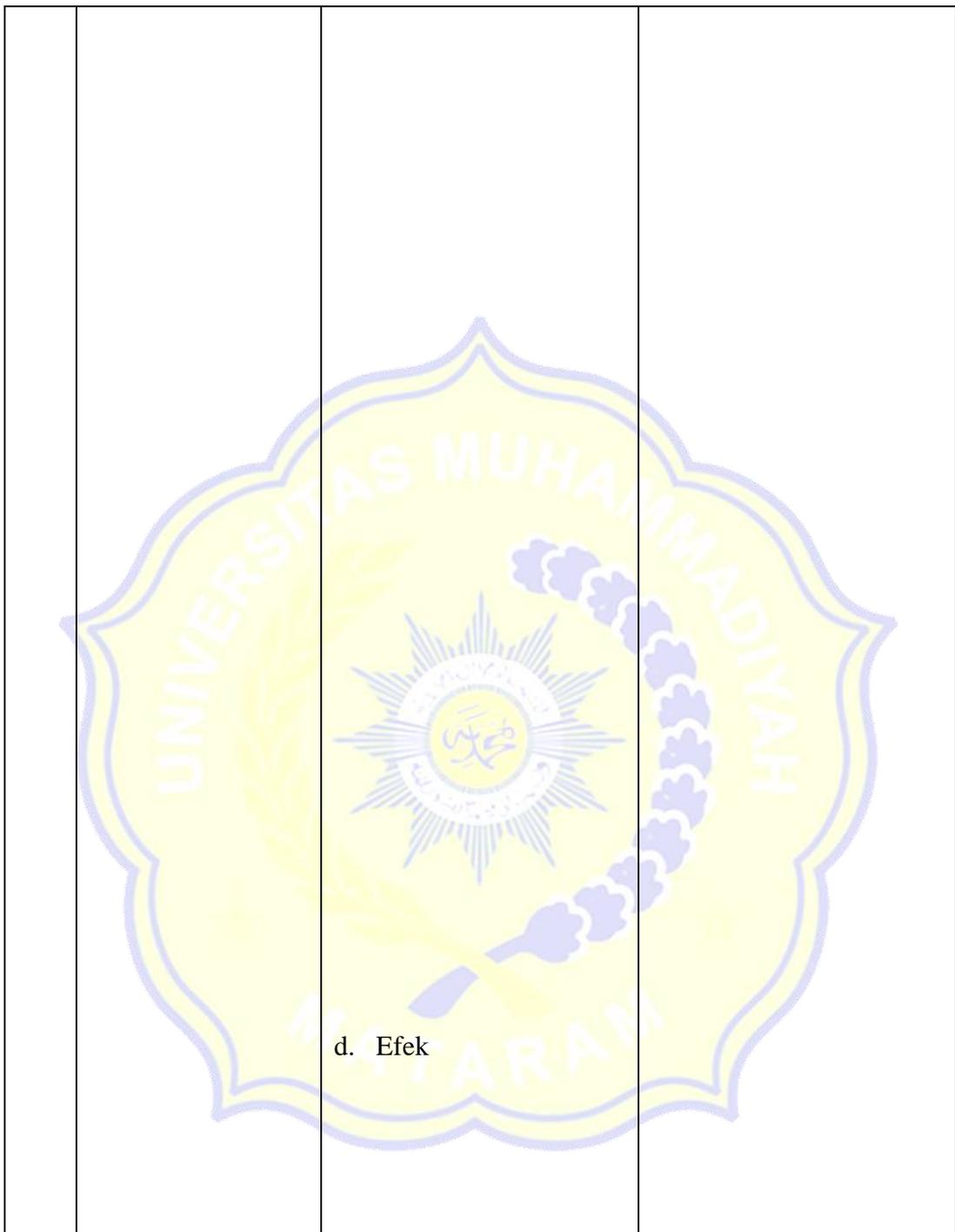
1. Pengumpulan sampah dari sumber sampah dan pemindahan ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
2. Pengangkutan sampah dari tempat asal ke tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, kemudian ke tempat pengolahan akhir;
3. Perubahan ciri, komposisi, dan volume sampah merupakan contoh pengolahan.
4. Pemrosesan sampah akhir melibatkan pengembalian sampah dan residu yang aman dari pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah khusus untuk bahan pembongkaran bangunan.

Tabel 2.2

2.3.2 Defenisi Operasional

NO	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Teori kebijakan	<p>a. Tujuan</p> <p>b. Program</p>	<p>Tujuan yaitu mencakup kompleksitas tujuan yang akan di capai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan.</p> <p>Program yaitu serangkaian instruksi yang di tulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada sebuah kebijakan.</p> <p>Program juga memiliki model pengekseskuan tertentu agar dapat secara langsung di eksekusi.</p> <p>Keputusan yaitu dapat dianggap sebagai suatu</p>

		<p>c. Keputusan</p>	<p>hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawahkan pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.</p> <p>Positif Kebijakan yang dihasilkan pemerintah.</p> <p>Negatif atau buruk Kebijakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena menimbulkan rasa tidak aman.</p>
--	--	---------------------	---



Sumber :Diolah dari Pemerintah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang menitikberatkan pada proses dan makna masalah yang diangkat dalam penelitian. Tujuannya untuk memberikan gambaran secara sistematis, menyeluruh, rinci, dan mendalam mengenai permasalahan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2016 dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian studi kasus ini menghasilkan gambaran umum dan mendalam tentang potret kondisi apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang ada di lapangan penelitian sebagai penelitian deskriptif.

3.2 Lokasi Penelitian

Penyelidikan berlangsung di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Sumbawa Barat, Kuang, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kompleks KTC, Kuang, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa lokasi ini dipilih:

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menangani masalah kebersihan dan penataan kota yang salah satunya memiliki peran penting dalam pengelolaan

sampah. Sehingga peneliti dapat mengumpulkan data penting saat berhadapan dengan masalah saat ini.

3.3 Sumber Data

Menurut Sugiono (2015), sumber data penelitian di sesuaikan dengan focus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih dengan mempertimbangkan perspektif emic, yang menyoroti perspektif informan, atau bagaimana mereka melihat dan menafsirkan dunia dari perspektif mereka. Peneliti tidak dapat memaksakan diri untuk memperoleh fakta yang diinginkan.

Teknik sampling yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Non probability Sampling*, di mana dalam teknik sampling tersebut peneliti menggunakan *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Purposive sampling adalah pendekatan pengambilan sampel yang memperhitungkan sejumlah faktor. Saat melakukan penelitian tentang kualitas pangan, misalnya, sumber data sampelnya adalah pakar pangan. Sedangkan Snowball Sampling adalah metode untuk menentukan sampel yang awalnya kecil dan kemudian bertambah besar. Ini seperti bola salju yang terus berguling dan membesar. Saat menentukan sampel, peneliti akan memilih satu atau dua orang, tetapi jika kedua orang tersebut tidak merasa puas dengan data yang disajikan, peneliti akan mencari orang lain yang tampaknya lebih tahu dan dapat mengisi kekosongan tersebut.

3.3.1 Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari informan dan responden melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara merupakan data primer untuk penelitian ini. Masyarakat atau masyarakat di wilayah Kota Taliwang yang berperan aktif maupun pasif dalam pengelolaan sampah menjadi responden dalam penelitian ini.

Sementara itu, kepala bagian kebersihan dan petugas kebersihan yang paham seluk beluk pengelolaan sampah akan diwawancarai sebagai sumber data. Beberapa responden yang diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan antara lain:

Table 3.1
Daftar Nama Informan

No	Informan	Jumlah Informan
1	Kepala dinas lingkungan hidup	1
2	Kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah	1
3	Kepala bidangTata lingkungan hidup	1
4	Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan	1
5	Kepala UPT sampah	1
6	Masyarakat	20
Jumlah		25

Sumber: Diolah Oleh Penulis

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data ini berupa dokumen-dokumen yang dapat berbentuk tabel statistik, buku peraturan, gambar yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data merupakan tahapan yang paling signifikan dalam penelitian, menurut Sugiono (2018), karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi persyaratan data jika tidak memahami metodologi pengumpulan data. Pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Berikut ini adalah uraian prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti:

3.4.1 Metode Observasi

Observasi adalah dasar dari segala ilmu, menurut Nasution 1988 dalam Sugiyono (2018). Ilmuwan hanya dapat beroperasi dengan data, yaitu informasi tentang dunia dan realitas yang diperoleh melalui pengamatan. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan observasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah kabupaten Sumbawa barat menangani pengelolaan sampah, khususnya di Sumbawa Barat.

3.4.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab guna mengembangkan makna dalam suatu isu (Sugiyono 2018). Oleh karena itu wawancara didefinisikan sebagai percakapan di mana berbagai aturan, tugas, sentimen, keyakinan, motif, dan informasi dipertukarkan. Wawancara bukanlah pertunjukan satu orang dimana satu orang berbicara sementara yang lain mendengarkan (Herdiyansyah, 2014).

Karena peneliti mengikuti pedoman wawancara yang disusun secara metodis dan komprehensif untuk memperoleh data yang ingin ditemukan, maka wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terstruktur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tanya jawab langsung dan mendalam, dan berikut adalah beberapa responden yang diminta untuk menyediakan data penting :

Table 3.2

Daftar Nama Informan

No	Informan	Jumlah Informan
1	Kepala dinas lingkungan hidup	1
2	Kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah	1
3	Kepala bidang Tata lingkungan hidup	1
4	Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan	1

5	Kepala UPT sampah	1
6	Masyarakat	20
Jumlah		25

Sumber: Diolah Oleh Penulis

3.4.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018) adalah catatan peristiwa masa lalu. Tulisan, foto, cerita, sejarah, karya seni, film, dan karya seni kolosal adalah contoh dokumen. Prosedur dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk membuktikan kebenaran atau keaslian hal-hal yang diamati atau diperiksa.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Sugiyono (2015) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, merinci menjadi unit-unit, mensintesis, dan menyusun menjadi pola, memilih nama yang sesuai penting dan akan dipelajari, serta menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini; dalam penelitian kualitatif, proses analisis data terjadi setelah tahap pengumpulan data selesai. Menurut penuturan Nasution dalam Sugiyono (2018), analisis dimulai dengan perumusan dan penjelasan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlanjut hingga hasil penelitian tertulis. Penelitian ini menggunakan

metodologi analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Milis dan Huberman dalam Sugiyono (2018), yang meliputi:

3.5.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti dari lapangan jumlahnya akan senantiasa bertambah banyak dan kompleks karena menggunakan triangulasi pada pengumpulan datanya. Jika ditanya tidak di rinci, dicatat dan di organisir maka bisa menjadi semakin rumit, untuk itu perlu adanya reduksi data. Data yang didapatkan dari setiap teknik pengumpulan data akan di reduksi, kemudian masing-masing hasilnya akan di reduksi kembali untuk lebih mengerucutkan pada arah hasil penelitian. Disinilah proses triangulasi muncul dalam reduksi data, di mana dengan adanya proses ini maka peneliti akan lebih memahami data yang di dapatnya. Seperti yang di jelaskan Sugiyono (2018) bahwa tujuan dari triangulasi sendiri adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang di temukan.

3.5.2 Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, bahasa cerita merupakan teknik yang paling populer untuk mengirimkan data, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018). Peneliti menggunakan bagan atau grafik, deskripsi singkat, dan alat lain untuk membantu peneliti memahami apa yang terjadi, yang terkadang membingungkan, dan merencanakan langkah selanjutnya saat menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah hasil baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Hasil ini dapat berbentuk deskripsi atau deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas setelah pemeriksaan dekat, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2018).

Seperti yang telah kita ketahui, kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan dapat berubah karena data yang dikumpulkan tidak mendukungnya. Akibatnya, kesimpulan penelitian mungkin berbeda dari kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif.

